

BAB I

PENDAULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak invasi militer yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina pada Februari 2022, negara - negara di Uni Eropa (UE) terancam krisis energi karena selama ini negara - negara UE mengalami ketergantungan terhadap bahan bakar fosil yang berasal dari Rusia (Commission, 2022). Oleh karena itu UE melakukan kebijakan REPowerEU sebagai langkah dalam menghindari kekurangan energi yang disebabkan oleh konflik tersebut serta mengakhiri ketergantungan UE terhadap bahan bakar fosil Rusia. Selain itu, kebijakan ini mendukung transisi UE ke energi bersih melalui penggunaan energi terbarukan. Hal ini sejalan dengan tujuan kebijakan iklim dan energi dari UE yaitu *Fit for 55* yang ditetapkan pada tahun 2021. Di dalam kebijakan tersebut, UE menargetkan untuk mengurangi emisi sebesar 55 % pada tahun 2030 (KPMG, 2022). Oleh karena itu dengan adanya REPowerEU maka tujuan dari kedua kebijakan ini akan tetap tercapai tanpa saling menghalangi, tujuan kebijakan *Fit for 55* tetap dapat dicapai karena keduanya mendukung transisi energi terbarukan (KPMG, 2022).

Kebijakan REPowerEU menekankan adanya diversifikasi energi yang menjadi salah satu tujuan dalam kebijakan ini agar tidak bergantung dengan gas Rusia. Oleh karena itu UE melakukan perjanjian impor gas dan *Liquefied Natural Gas* (LNG) dengan negara - negara berkembang seperti Mesir dan Israel (Commission, 2022). Tetapi pembelian gas dan LNG ini tidak dapat dibeli sendiri oleh negara - negara UE, melainkan mereka harus melakukan pembelian bersama yang dikoordinasi oleh *EU Energy Platform* yang akan mengatur segala agregasi permintaan gas, infrastruktur, hingga jangkauan dengan mitra internasional

(Commission, 2022). Peraturan pembelian bersama ini dilakukan agar penyimpanan gas mencapai target untuk musim dingin. Selain itu di dalam kebijakan ini UE memberlakukan target dalam penghematan energi untuk masyarakat UE. Hal ini dilakukan agar seluruh anggota UE setuju untuk mengurangi konsumsi gas sebesar 15% sebagai langkah untuk penghematan energi (Commission, 2022). Meskipun penggunaan gas masih cukup krusial untuk UE, tetapi terdapat keinginan dari UE untuk menggantikan sumber energi gas dengan sumber energi yang terbarukan seperti hidrogen, biometana, tenaga surya, dan tenaga angin yang menghasilkan energi yang lebih bersih serta menjadikan UE lebih dekat dalam mencapai kemandirian energi.

Ketergantungan UE terhadap energi fosil Rusia sebenarnya di mulai pada tahun 1970an ketika Rusia masih berbentuk Uni Soviet. Pada masa itu Rusia memiliki pusat cadangan minyak dan gas yang bertempat di Siberia barat menjadi salah satu pemasok energi fosil untuk kebutuhan negara- negara Eropa. Pada tahun 1980an Jerman Barat sempat memiliki, ingin membangun pipa gas besar yang menghubungkan dari Siberia barat ke Jerman. Hal ini di tolak keras oleh Amerika Serikat tetapi usaha yang dilakukan Amerika Serikat tidak menghentikan Jerman Barat dan hal ini menjadi awal mula menyebarnya ekspor gas dan minyak Rusia di daerah eropa barat (Becker et al., 2024). Setelah jatuhnya Uni Soviet pada Desember 1991, produksi minyak Rusia menjadi lebih sedikit sedangkan produksi gas tetap tidak berubah. Rusia sempat beberapa kali menghentikan ekspor bahan bakar fosilnya terhadap negara - negara bekas Uni Soviet. Seperti di tahun 1992 Rusia pernah menghentikan ekspor gasnya terhadap Ukraina, dikarenakan Ukraina melakukan *non -payment*. Selain itu Georgia pernah mengalami penutupan pipa minyak yang dilakukan oleh Rusia, hal ini terjadi pada tahun 2003 yang disebabkan

oleh dibangunnya pipa minyak dari Baku ke Georgia, pipa minyak tersebut dimiliki oleh perusahaan barat, dari pembangunan pipa minyak tersebut Rusia menghentikan ekspor minyaknya ke Georgia. Negara - negara Baltik pernah mengalami penutupan pipa minyak yang dilakukan oleh Rusia ditahun 1992, penutupan pipa minyak ini dilakukan oleh Rusia agar Negara - Negara Baltik membatalkan permintaannya atas ditariknya pasukan Rusia dari Negara - Negara Baltik (Brown, 2019). Meskipun hubungan Rusia kurang baik dengan negara - negara bekas Uni Soviet, tetapi pada masa itu Rusia lebih mementingkan hubungannya terhadap negara - negara UE dalam bidang energi fosil seperti Republik Ceko, Hungaria, Slovakia, Bulgaria, Jerman, Itali, Belanda, dan Austria yang menggunakan energi fosil Rusia menyebutkan bahwa energi fosil Rusia lebih aman dan murah. (Becker et al., 2024).

Semakin banyaknya negara - negara UE yang mengimpor energi fosil dari Rusia maka UE membuat suatu kebijakan energi yang menyatakan bahwa setiap aktor individu tidak boleh memiliki semua bagian yang berhubungan dengan pemasokan energi seperti produksi, jaringan, dan juga distribusi. Jadi setiap aktor individu hanya memiliki salah satu bagian yang berhubungan dengan pemasokan energi. hal ini dilakukan oleh UE dengan tujuan untuk meliberalisasi pasar energi UE kebijakan ini tentu saja merugikan Gazprom sebagai pemasok gas alam utama Rusia yang menginginkan sekali mengontrol semua bagian dari pemasokan energi di UE. Di tahun 2006 Gazprom melakukan penutupan gas pipa yang melewati Ukraina (Becker et al., 2024). Hal ini dikarenakan oleh tuduhan Rusia yang mencurigai Ukraina mencuri gas alam yang bernilai 25 juta USD dan seharusnya di ekspor untuk negara - negara UE (*BBC NEWS*, 2006). Permasalahan ini menyebabkan pipa gas di tutup selama empat hari, dan hal ini cukup membuat

negara - negara UE terganggu dengan terhambatnya aliran gas Rusia ke UE. Penutupan pipa gas ke Ukraina kembali terjadi di tahun 2009, dikarenakan Ukraina tidak membayar hutang pembelian gas terhadap Rusia (*BBC NEWS*, 2009). Permasalahan ini juga berdampak terhadap aliran gas untuk negara - negara UE, kekecewaan UE ini menghasilkan kebijakan baru yang tidak memperbolehkan produsen gas untuk memiliki pipa gas. Oleh karena kebijakan tersebut, Rusia menjual pipa gasnya yang berada di negara - negara Baltik (Becker et al., 2024).

Di tahun 2014 Rusia melakukan aneksasi secara ilegal terhadap daerah Krimea. UE yang berpihak ke Ukraina menjatuhkan sanksi terhadap 21 individu yang terlibat di dalam referendum ilegal di Krimea, konflik ini semakin diperburuk dengan tertembaknya pesawat Malaysia Airlines oleh pihak Rusia yang membuat UE memberikan sanksi berupa larangan melakukan ekspor perlengkapan dan teknologi militer ke Rusia, serta dibatasi penggunaan teknologi dalam sektor minyak (Becker et al., 2024). Konflik ini menyadarkan UE untuk mulai merancang strategi untuk melepaskan ketergantungan terhadap energi fosil, agar menjaga ketahanan pasokan energi dan tidak terganggu lagi dengan adanya konflik Rusia. Hingga di tahun 2020 ketergantungan UE terhadap energi fosil Rusia masih terjadi dengan total impor energi dari Rusia sebesar 115 miliar USD (Becker et al., 2024). Di tahun 2021 telah menurun menjadi 107 miliar USD (Group, 2022).

Sejak Rusia menginvasi Ukraina di tahun 2022, mengakibatkan lonjakan harga energi fosil di UE. Hal ini menyebabkan UE melakukan perubahan kebijakan dengan mengeluarkan kebijakan REPowerEU, tujuan dikeluarkannya kebijakan tersebut untuk melepas ketergantungan terhadap energi fosil Rusia dan melakukan transisi energi. Beberapa perubahan tersebut meliputi diversifikasi energi dilakukan oleh UE, yang dimana sebelumnya Rusia menjadi importir gas terbesar di UE pada

tahun 2021 dengan pangsa impor gas sebesar 45% , sekarang dengan adanya kebijakan REPowerEU jumlah pangsa impor Rusia berkurang menjadi 15 % di tahun 2023. sekarang UE lebih berfokus kepada pemasok energi dari negara lain seperti Norwegia yang menyumbang 30%, Amerika Serikat 19%, negara - negara Afrika Utara 14,1%, Inggris 5,7% dan Qatar 5,3%. meskipun begitu energi fosil dari Rusia belum sepenuhnya ditinggalkan tetapi setiap tahun pembelian energi fosil dari Rusia akan dikurangi hingga tahun 2030 UE harus melepas sepenuhnya energi fosil Rusia dan menggunakan energi campuran antara fosil dan terbarukan (Commision, 2022). Selain itu sejak UE meresmikan kebijakan REPowerEU, kerjasama energi yang dilakukan UE dengan negara lain tidak hanya berfokus pada energi fosil tetapi juga melakukan kerjasama energi terbarukan, seperti Mesir yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan UE dalam hal hidrogen (Commission, 2022). Serta negara berkembang lainnya seperti Namibia membantu UE dalam memasok bahan mentah untuk pembangunan pembangkit energi terbarukan serta memberikan pasokan hidrogen (Commission & Namibia, 2022). Sama halnya dengan Jepang yang telah melakukan perjanjian dengan UE untuk memberikan pasokan hidrogen (Commission & Japan, 2024). Langkah UE dalam melakukan transisi energi menjadi bentuk UE untuk mencapai kemandirian energi (Commision, 2022).

Terdapat tiga penelitian yang menjadi refrensi sebagai tinjauan literatur, yang pertama yaitu Francesca Masiero dengan penelitian yang berjudul “*From Fossil To Green: Reshaping EU’s Energy Security And Diplomacy*” lalu yang kedua yaitu ditulis oleh Rosalba Fama dengan penelitian yang berjudul “*REPowerEU: Next Generation EU’s Architecture Beyond the Pandemic*” dan yang ketiga yaitu Rubben Vezoni yang berjudul “*Green Growth For Whom, How, And Why? The*

REPowerEU Plan And The Inconsistencies Of European Union Energy Policy".

Pada penelitian pertama sebagai penelitian yang memiliki pembahasan utama mengenai konsep *Energy Diplomacy* oleh Francesca Masiero (2023) di dalam penelitian tersebut berfokus pada langkah UE yang melakukan transisi energi selain itu di penelitian ini penulis menjelaskan tantangan dari bahanbaku mentah lithium untuk kendaraan listrik yang dikuasai oleh China, penulis jugamemberikan sebuah penjelasan pentingnya pendekatan secara strategis dengan *Energy Diplomacy* yang memungkinkan untuk memanfaatkan kerjasama UE dengan Amerika Serikat dalam hal bahan baku mentah dan melakukan investasi pada riset dan inovasi. Pada penelitian kedua yang ditulis oleh Rosalba Fama (2023) berfokus pada kebijakan REPowerEU menjadi implementasi pertama NGEU (*Next Generation EU*) yang terlepas dari persoalan pandemi. Lalu di penelitian terakhir milik Rubben Vezoni (2023) berfokus pada kritik yang diberikan oleh penulis terhadap kebijakan REPowerEU dan juga mengkritisi narasi *Green Growth* UE yang memisahkan perkembangan ekonomi dari dampak lingkungan. dari tinjauan literatur tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut memiliki pembahasan yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena penulis lebih menekankan pada pembahasan mengenai alasan UE melakukan perubahan kebijakan dengan mengeluarkan kebijakan REPowerEU pada masa krisis energi yang disebabkan oleh konflik Rusia - Ukraina.

1.2 Rumusan Masalah

Pemaparan latar belakang tersebut yang membahas mengenai awal mula munculnya kebijakan REPowerEU. rencana REPowerEU untuk masa depan hingga target yang harus dicapai oleh UE maka penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu “ Mengapa terjadi perubahan kebijakan Uni Eropa dalam bingkai kebijakan

REPowerEU mengatasi krisis energi yang disebabkan oleh konflik Rusia - Ukraina pada tahun 2022 - 2024? “

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan penelitian secara umum adalah sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk kelulusan dan untuk memperoleh gelar sarjana dalam program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini akan membahas mengenai alasan Uni Eropa melakukan perubahan kebijakan dengan mengeluarkan kebijakan REPowerEU yang disebabkan oleh tekanan domestik ataupun internasional dalam memberikan respon terhadap konflik Rusia-Ukraina.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 *Foreign Policy Change* (Teori Perubahan Kebijakan Luar Negeri)

Menurut beberapa ahli kebijakan luar negeri diartikan sebagai serangkaian tujuan, arahan, atau maksud yang disusun oleh orang yang memiliki posisi berkuasa yang bertujuan untuk aktor yang berada di luar wilayah kedaulatan agar mengikuti mempengaruhi target untuk mengikuti keinginan pembuat kebijakan (Gustavsson, 1999). Perubahan kebijakan luar negeri menurut Jerel A. Rosati memiliki pengertian bahwa fenomena kebijakan luar negeri yang mengalami perubahan luas baik perubahan kecil hingga restrukturisasi kebijakan luar negeri besar - besaran (Rosati et al., 1994). Perubahan kebijakan luar negeri ini dapat berdampak secara

mendalam baik secara domestik ataupun secara internasional, bahkan perubahan kebijakan dapat berujung pada peperangan oleh karena itu perlu diketahui dasar - dasar dari perubahan kebijakan luar negeri (Eidenfalk, 2006).

Sebelum terjadinya perubahan kebijakan luar negeri, perlu dipahami faktor - faktor yang menyebabkan diambilnya keputusan tersebut. Didalam pemahaman perubahan kebijakan luar negeri Joakim Eidenfalk, faktor tersebut di sebut sebagai “*source of change*” yang terbagi menjadi dua bagian yaitu faktor domestik dan internasional, dengan faktor - faktor tersebut maka membuka “*Windows Of Opportunity*” yang dapat dipergunakan oleh penentu keputusan untuk melakukan perubahan kebijakan luar negeri (Eidenfalk, 2006).

Di dalam faktor domestik terdapat lima faktor yang dapat menjadi sumber agar terjadi perubahan kebijakan luar negeri, yang pertama yaitu birokrasi meskipun birokrasi dikenal sebagai sumber dari stabilitas tapi birokrasi juga dapat menjadi sumber perubahan. Hal ini dapat disebabkan oleh suatu kelompok yang mengatur pemerintahan, sedangkan birokrasi yang sifatnya hanya berjalan pada saat adanya dorongan dari suatu kelompok maka hal tersebut dimanfaatkan dengan memanfaatkan birokrasi untuk mengadvokasi perubahan tersebut (Eidenfalk, 2006).

Selain itu opini publik juga dapat menjadi salah satu faktor perubahan kebijakan luar negeri, hal ini dikarenakan didalam suatu perubahan diperlukan adanya dukungan atau desakan yang berasal dari masyarakat oleh karena itu dengan adanya dukungan atau desakan tersebut dapat memberikan tekanan pada pemberi keputusan pemerintah agar merubah kebijakan luar negeri tersebut. meskipun opini publik dapat menjadi pendukung munculnya suatu kebijakan tetapi juga menjadi sumber perubahan kebijakan (Eidenfalk, 2006).

Media menjadi salah satu faktor terpenting didalam perubahan kebijakan luar negeri, karena publik dan pemerintah di hubungkan dengan media yang menjadikan pemerintah harus mementingkan media dalam mensukseskan suatu kebijakan selain itu media juga dapat melakukan penolakan terhadap suatu kebijakan dengan memberikan pengaruh terhadap opini publik agar menekan pemerintah untuk melakukan perubahan (Eidenfalk, 2006).

Kelompok kepentingan dapat memberikan dampak perubahan terhadap kebijakan luar negeri, kelompok kepentingan sendiri dipahami sebagai asosiasi yang selalu berhubungan dengan aktivitas keputusan pemerintah, kelompok ini diisi dengan masyarakat yang melakukan lobi, bisnis serta mewakili suara kelompok - kelompok yang terpinggirkan (Dietrich, 2004). Di masa sekarang kelompok kepentingan sudah di pandang penting karena pengaruhnya yang semakin meningkat menjadikan pengambil keputusan pemerintah memerlukan perngaruh kelompok kepentingan untuk mendukung kebijakan tersebut, termasuk dalam perubahan kebijakan juga dapat berasal dari tekanan kelompok kepentingan (Eidenfalk, 2006).

Pada poin yang terakhir yaitu partai politik, didalam suatu negara terdapat parlemen yang diisi oleh partai politik yang mendukung pemerintahan untuk membentuk kebijakan atau merubah kebijakan tersebut lalu ada juga partai oposisi yang memberikan pengaruh terhadap terbentuknya kebijakan pemerintah. Di dalam hal ini opini publik dan pemilih melakukan tekanan terhadap anggota parlemen dan pemerintah, hal ini menyebabkan pemerintah mempertimbangkan kembali keputusan mereka dalam menyusun kebijakan (Eidenfalk, 2006).

Di dalam faktor internasional terdapat empat faktor yang dapat menjadi sumber perubahan kebijakan luar negeri, yang pertama yaitu faktor global yang

dimaksud dengan faktor global yaitu perubahan sistem politik internasional yang berdampak terhadap pembuatan kebijakan luar negeri, perubahan sistem politik internasional biasanya terjadi karena adanya sebuah peristiwa atau aktor yang memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan suatu negara untuk melakukan pembuatan kebijakan atau perubahan kebijakan (Eidenfalk, 2006).

Faktor regional hampir sama dengan faktor global penyebab perubahan dapat terjadi disebabkan oleh suatu peristiwa atau aktor yang berskala regional, seperti contohnya tragedi pengeboman Bali yang terjadi pada tahun 2002, peristiwa tersebut berdampak terhadap sistem politik regional Asia Tenggara, institusi regional juga memiliki dampak yang cukup besar terhadap pembentukan kebijakan luar negeri. Norma - norma yang berada di wilayah tertentu dapat dijadikan sebuah pertimbangan oleh suatu negara bila membentuk sebuah kebijakan. *Regional balance of power* juga dapat menjadi salah satu hal yang perlu di pertimbangkan di dalam faktor regional (Eidenfalk, 2006).

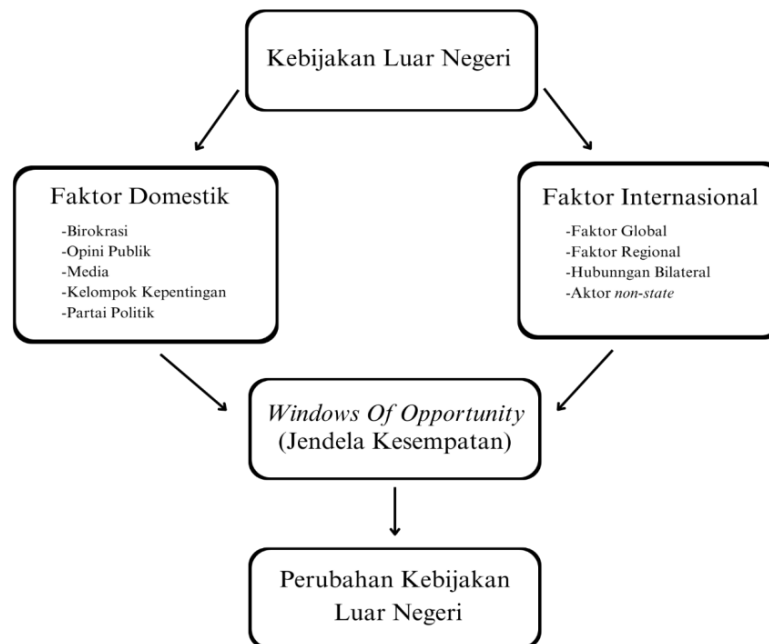
Hubungan bilateral menjadi salah satu faktor dikarenakan hubungan bilateral suatu pemerintahan dengan aktor, saling memberikan pengaruh dengan melakukan persekutuan, perdagangan, atau dengan melakukan ancaman ekonomi dan militer tekanan tersebut memaksa mereka untuk beradaptasi, atau menyesuaikan kebijakan luar negeri mereka (Eidenfalk, 2006).

Aktor *Non-State* seperti aktor transnasional yang meliputi jaringan kriminal, teroris, perusahaan dan organisasi HAM dapat memberikan pengaruh terhadap terbentuknya kebijakan luar negeri. Meskipun negara menjadi aktor utama dalam sistem politik internasional tetapi aktor - aktor transnasional dapat membawa pengaruh yang cukup besar serta perlu dipertimbangkan oleh pengambil keputusan dalam membentuk atau merubah kebijakan luar negeri (Eidenfalk, 2006).

Setelah adanya *source of change* maka berlanjut pada langkah selanjutnya dari perubahan kebijakan luar negeri milik Eidenfalk yaitu *Windows Of Opportunity* atau disebut sebagai jendela peluang. *Windows Of Opportunity* sendiri merupakan sebuah konsep yang terinspirasi dari Jakob Gustavsson dan Roger Kingdon dengan analogi *Policy Windows* yang memiliki pengertian bahwa momentum peluang yang dapat dipergunakan untuk memperkenalkan perubahan (Gustavsson, 1999). menurut Eidenfalk segala bentuk *source of change* harus melewati proses *Windows Of Opportunity* agar berdampak terhadap proses pengambilan keputusan dan terjadi perubahan kebijakan luar negeri, oleh karena itu didalam proses ini aktor utamanya ialah pembuat keputusan dan persepsinya terhadap peluang tersebut (Eidenfalk, 2006).

Didalam proses ini, pembuat keputusan mendapatkan jendela peluang berasal dari tekanan atau pengaruh dari *source of change* yang membuat mereka menyadari adanya peluang tersebut. Oleh karena itu agar perubahan kebijakan luar negeri dapat tercapai maka pembuat kebijakan perlu menindaklanjuti peluang tersebut, bila pembuat keputusan melewatkan peluang tersebut maka mereka harus menunggu peluang tersebut di lain waktu.

1.5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1.1 Sintesa Pemikiran

Sintesa disusun oleh penulis sebagai berikut, terjadinya perubahan kebijakan luar negeri disebabkan oleh faktor domestik dan internasional yang menjadi pengaruh terjadinya perubahan kebijakan luar negeri. Faktor domestik meliputi birokrasi, opini publik, media, kelompok kepentingan, dan partai politik. Sementara itu, untuk faktor internasional meliputi faktor global, regional, hubungan bilateral, serta aktor *non-state*. Dari kedua faktor tersebut dapat digunakan oleh penentu keputusan untuk merespon munculnya *Windows Of Opportunity* atau jendela peluang yang dimanfaatkan untuk melakukan perubahan kebijakan luar negeri.

1.6 Argumen Utama

Kebijakan REPowerEU dipengaruhi oleh faktor domestik dan internasional. Dari faktor domestik: (1) Birokrasi pada saat krisis energi yang melanda UE memicu Komisi UE untuk mengusulkan kebijakan REPowerEU sebagai respons terhadap tekanan tersebut. Kebijakan ini juga mencerminkan kepedulian UE

terhadap Ukraina. (2) Opini publik, yang tercermin dari survei ECFR (European Council on Foreign Relations), menunjukkan bahwa masyarakat UE mendukung tindakan UE terhadap Rusia jika terjadi invasi ke Ukraina, meskipun dengan potensi kenaikan harga bahan bakar.

(3) Media dapat diperhatikan pada media – media UE, seperti Eureporter dan Politico, mendorong tindakan tegas dari UE untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil Rusia dan menganalisis dampak konflik terhadap pasar energi UE. (4) Kelompok kepentingan di UE, termasuk ESPR (European Society for Pediatric Research) dan EFONI (European Foundation for the Care of Newborn Infants), menyatakan kepedulian terhadap anak-anak korban konflik, sementara Age Platform Europe menunjukkan kekhawatiran terhadap dampak konflik pada masyarakat lansia.

(5) Partai politik, respon beberapa partai politik UE juga signifikan. Partai EFA (European Free Alliance) mendukung transisi energi untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil Rusia. Partai EPP (European People’s Party) mendukung Ukraina dan rencana Komisi UE untuk penyimpanan energi musim dingin. Partai ECR (European Conservatives and Reformists) memberikan dukungan serupa tetapi mengkritik kebijakan UE yang masih membeli LNG sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan pada energi fosil Rusia. Pada aspek faktor internasional terdapat 4 faktor yaitu : (1) faktor global yaitu dipengaruhi oleh adanya konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Dari segi (2) faktor regional, dibuktikan dengan masalah perizinan pada negara – negara anggota UE yang dapat memperlambat akselerasi energi terbarukan. (3) Hubungan bilateral antara UE dan Ukraina yang telah disepakati sejak 2017 turut memengaruhi perubahan kebijakan UE, dengan tujuan mendukung Ukraina dan mempertahankan

hubungan bilateral tersebut. Untuk (4) Aktor non-negara seperti *Greenpeace* juga merekomendasikan agar UE mengurangi ketergantungan pada energi fosil Rusia sebagai tanggapan terhadap invasi Ukraina.

Faktor-faktor ini menciptakan "Windows of Opportunity" atau jendela peluang, di mana krisis energi akibat konflik Ukraina-Rusia dimanfaatkan oleh pengambil keputusan UE untuk mengadopsi kebijakan REPowerEU. Kebijakan ini bertujuan untuk transisi energi guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil Rusia dan mencapai kemandirian energi.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Untuk mendalami pemahaman, alasan UE melakukan perubahan kebijakan dengan mengeluarkan kebijakan REPowerEU pada masa krisis energi, maka dari itu penelitian ini menggunakan tipe penelitian eksplanatif, pengertian dari penelitian eksplanatif adalah untuk memberikan penjelasan mengapa suatu hal terjadi atau menjawab pertanyaan "mengapa (*why*)" (Alas, 2016). Oleh karena itu penelitian eksplanatif ini sangat cocok sekali digunakan untuk menjelaskan penelitian ini, agar dapat memberikan penjelasan dan jawaban untuk rumusan masalah penelitian.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian yang digunakan yaitu pada tahun 2022 - 2024. dipilihnya tahun tersebut karena di tahun 2022 menjadi tahun awal mula UE mengalami krisis energi karena invasi Rusia terhadap Ukraina dan menjadi tahun dimana UE meresmikan kebijakan REPowerEU, dan di tahun 2024 menjadi evaluasi tahun kedua kebijakan REPowerEU karena dari evaluasi tersebut dapat

melihat berhasil atau tidaknya usaha dari kebijakan REPowerEU dalam mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan proses transisi energi yang dilakukan oleh UE.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian sangat diperlukan sebuah teknik pengumpulan data, oleh karena itu penelitian ini yang memiliki tipe penelitian eksplanatif maka perlu teknik pengumpulan data kualitatif, Data kualitatif adalah data mentah dari dunia empiris. Data kualitatif itu berwujud uraian rinci, kutipan langsung, dan dokumentasi kasus. Data ini dikumpulkan sebagai suatu cerita terbuka (*open-ended narrative*) (Sitorus, 1998).

Dengan menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif maka di dalam penelitian ini lebih berfokus pada data sekunder yaitu data yang diperoleh dari, dokumentasi grafis, film, foto, artikel berita, dan jurnal, yang selanjutnya akan dijabarkan secara eksplanatif di penelitian ini

1.7.4 Teknik Analisis Data

Sesuai dengan penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan yaitu teknis analisis data kualitatif, dan teknik analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. (Fatmawati, 2013) sesuai pernyataan tersebut penelitian ini tidak menggunakan data numerik, maka lebih tepat menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif karena data yang dikumpulkan juga kualitatif.

Di dalam penelitian ini, penulis lebih berfokus pada pengumpulan data non-numerik dan menggunakan data tersebut untuk memberikan kesimpulan dari data

yang ditemukan yang berkaitan dengan alasan UE melakukan perubahan kebijakan dengan mengeluarkan kebijakan REPowerEU pada masa krisis energi yang disebabkan oleh konflik Rusia - Ukraina.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 4 bab yang tersusun sebagai berikut:

- BAB I berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka penelitian, sintesa pemikiran, argumen utama dan metodologi penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
- BAB II berisi tentang penjelasan faktor domestik dan internasional yang mempengaruhi terbentuknya kebijakan luar negeri REPowerEU.
- BAB III berisi tentang penjelasan mengenai *Windows Of Opportunity* yang mendorong terjadinya perubahan kebijakan, dan ekplanasi mengenai perubahan yang terjadi dikarenakan kebijakan REPowerEU serta dampaknya terhadap kebutuhan energi di Uni Eropa.
- BAB IV berisi tentang kesimpulan dari penelitian.